

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOSOBO**

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan T. Jogonegoro Nomor 13 Wonosobo Telp. (0286) 321339
WONOSOBO 56314**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2021, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan plotting anggaran yang dipercayakan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJiP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Wonosobo, Februari 2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara bertahap berupaya untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan terkait bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo.

Mengacu pada Visi Bupati Wonosobo 2016-2021, *“Terwujudnya Wonosobo bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua”* serta misi Bupati Wonosobo, Khususnya Misi keempat yaitu *Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata*. Pelayanan DPPKBPPPA memiliki tujuan mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran :

1. Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat
2. Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan
3. Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah
4. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan
5. Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja.

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Gambaran Umum Organsiasi
4. Fungsi Strategis Dinas
5. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

1. Rencara Strategis dan Anggaran
2. Rencana Kerja Tahun 2023

Bab III Akuntabilitas Kinerja

1. Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
2. Urusan Pemberdayaan Pemerpuan dan Perlindungan Anak

Bab VIII Penutup

1. Tinjauan Umum capaian kinerja
2. Strategi

BAB I

PENDAHULUAN

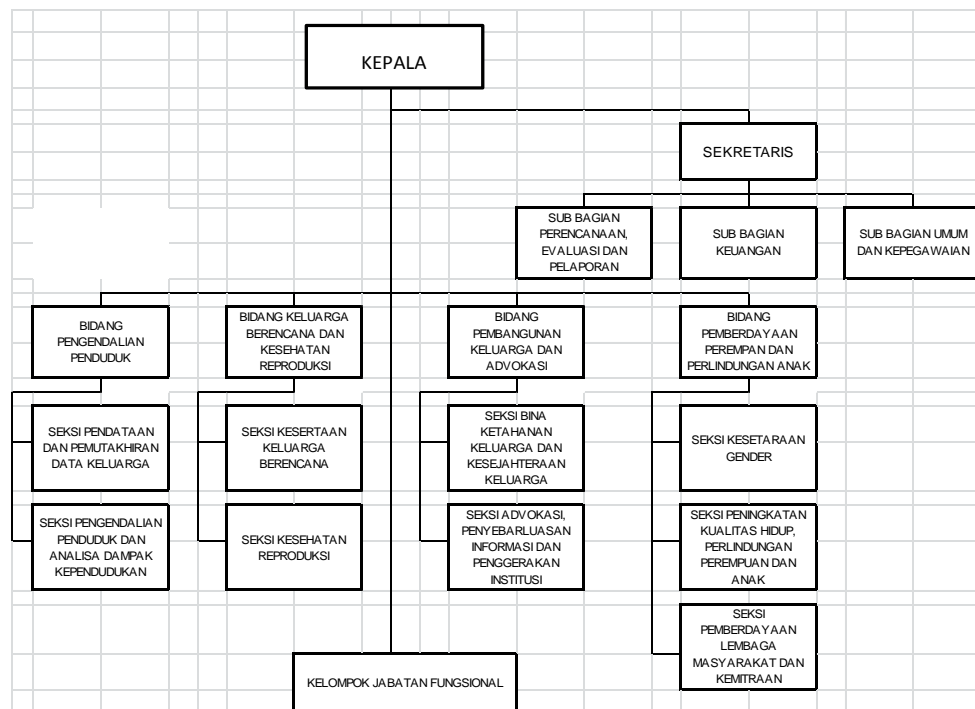
1. Latar Belakang

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo mengampu dua urusan yang pertama adalah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan yang kedua Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana tujuan utama adalah menciptakan keluarga yang berkualitas baik dari jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga yang ideal, sehingga tercipta anak berkualitas, meningkatnya peran perempuan didalam pembangunan serta menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Gambaran Umum Organisasi

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10). Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat seorang Kepala, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Adapun Sekretariat terdiri dari Seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian. Bidang-bidang yang ada adalah: Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Bidang Pembangunan Keluarga dan Advokasi serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:



3. Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, serta

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut:

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pengkoordinasian, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, tata usaha, tata laksana, dan pengorganisasian, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pengendalian Penduduk

Tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian penduduk.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian penduduk.
- 2) Penyiapan, pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengendalian penduduk.
- 3) Pengkoordinasian kebijakan pengendalian penduduk.
- 4) Pengkajian, dan pengembangan kebijakan, strategi, dan program di sektor pengendalian penduduk.
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk.

Bidang pengendalian penduduk terdiri dari :

- a) Seksi Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga
- b) Seksi Pengendalian Penduduk dan Analisa Dampak Kependudukan

d. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Tugas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesertaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesertaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesertaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesertaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 4) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesertaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesertaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari:

- 1) Seksi Kesertaan Keluarga Berencana
- 2) Seksi Kesehatan Reproduksi

e. Bidang Pembangunan Keluarga dan Advokasi

Tugas Bidang Pembangunan Keluarga dan Advokasi mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pembangunan Keluarga dan Advokasi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembangunan Keluarga dan Kesehatan Advokasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga, advokasi, penyebarluasan dan penggerakan institusi.
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga, advokasi, penyebarluasan dan penggerakan institusi.
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga, advokasi, penyebarluasan dan penggerakan institusi.
- 4) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga, advokasi, penyebarluasan dan penggerakan institusi.
- 5) Pemantauan, evaluasi dan dan pelaporan di bidang ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga, advokasi, penyebarluasan dan penggerakan institusi.

Bidang Pembangunan Keluarga dan Advokasi terdiri dari:

- 1) Seksi Bina Ketahanan keluarga dan Kesejahteraan Keluarga
- 2) Seksi Advokasi, penyebarluasan Informasi dan Penggerakan Institusi

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 4) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 5) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- 1) Seksi Kesetaraan Gender
- 2) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan perempuan dan Anak
- 3) Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan kemitraan

4. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumberdaya Manusia

Uraian pengantar mengenai Sumber Daya Manusia di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 44 pegawai yang terdiri dari 36 ASN dan 14 Non ASN,

disamping itu di dinas terdapat 57 PKB dan PLKB yang merupakan ASN pusat yang ditempatkan di 15 kecamatan di kabupaten wonosobo, demikian dengan rincian pegawai dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Wonosobo Tahun 2021

NO	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS		JUMLAH		
		L	P	L	P	L	P	TOTAL
1	SD sederajat	1				1		1
2	SMP			2		2		2
3	SMA sederajat	3	7	5	2	8	9	17
4	D4		1				1	1
5	D 3	1	2	1	1	2	3	5
6	S1	2	5	3		5	5	10
7	S2	2	6			2	6	8
8	S3							
JUMLAH		9	21	11	3	20	24	44

Sumber: Data Kepegawaian 2021

Tabel 1.2**Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon bulan Februari Tahun 2021**

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Esselon II-b	-	-	-
2	Esselon III-a	-	1	1
3	Esselon III-b	-	3	3
4	Esselon IV-a	4	7	11
	TOTAL	3	11	14

Sumber: Data Kepegawaian 2021

Tabel 1.3**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Februari Tahun 2021**

No	Golongan	DPPKBPPPA		Penyuluh KB		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Golongan IV/b		1			1
2	Golongan IV/a	3	3		2	8
3	Golongan III/d	2	8	1	7	18
4	Golongan III/c			1	2	3
5	Golongan III/b		1	5	6	12
6	Golongan III/a		3	3	5	11
7	Golongan II/d	2	1	7	9	19
8	Golongan II/c	2		6	3	11
9	Golongan II/b	1	2			3
10	Golongan II/a					
11	Golongan I/c	1				1
	TOTAL	11	19	23	34	87

Sumber: Data Kepegawaian 2021

b. Sarana dan Prasarana

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi barang bergerak dan tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di
DPPKBPPPA Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	2		2
2	Gedung Balai Penyuluhan	15		15
3	Gudang Alkon	1		1
4	Kendaraan Roda 4	10		10
5	Kendaraan roda 2	103		103
6	Meja Kursi Tamu	4		4
7	Meja Tulis	2		2
8	Kursi kerja pejabat	31		31
9	Kursi kerja ½ biro	30		30
10	Meja rapat	28		28
11	Kursi rapat tainles	210		210
12	Kursi rapat plastic	50		50
13	Rak arsip (kayu)	16		16
14	Almari arsip	3		3
15	Almari besi	2		2
16	Almari kaca	2		2
17	Almari kamera	1		1
18	Notebook	2		2
19	Laptop	6		6
20	Printer	3		3
21	Komputer	66		66
22	PC Komputer	11		11

23	Mesin ketik	2		2
24	Televisi	2		2
25	Pesawat telepon	2		2
26	Mesin fax	1		1
27	Genset	1		1
28	Kamera	3		3
29	Video Shooting (Handycam)	2		2
30	Filling Kabinet	15		15
31	Filling Besi	1		1
32	Filling Kayu	1		1
33	Mesin Ketik	15		15
34	Kursi Kerja	30		30
35	Kipas Angin	7		7
36	Kipas Angin Berdiri	5		5
37	Kipas Angin Duduk	3		3
38	Kompas Gas	3		3
39	Tabung Gas	2		2
40	Amplifier	1		1
41	Home Speaker	1		1
42	Microfone	3		3
43	Camera Digita	5		5
44	Camera Video	3		3
45	LCD Proyektor	25		25
46	Tape Recorder	15		15
47	DVD Player	1		1
48	Layar Film	1		1
49	Recorder Digital	1		1
50	Handy Talky	1		1
51	Obgin Bed Dunhil	4		4
52	Dispenser	2		2
53	Meja Komputer	2		2
54	Almari Almunium	1		1
55	Tenda	1		1
56	Potabel Generating set	1		1
57	White board	4		4
58	Papan nama instansi	1		1

Sumber: data DPPKBPPPA 2021

5. Fungsi Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Peraturan Daerah 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10). mempunyai fungsi strategis yaitu mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tertanggulangnya kemiskinan melalui program pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, secara garis besar dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai mandate yang harus dipertanggungjawabkan yaitu:

1. menekan angka laju pertumbuhan penduduk.
2. meningkatkan angka usia perkawinan pertama perempuan.
3. meningkatkan kepesertaan kontrasepsi jangka panjang.
4. meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.
5. meningkatkan perlindungan dan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

6. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Organisasi, Fungsi Strategis Dinas dan Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

Berisi Rencana Strategi dan Anggaran Dinas serta Rencana Tahun 2023 Dinas

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan capaian Kinerja Organisasi dan Relisasi Anggaran

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum capaian kinerja dan Strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategi dan Anggaran Dinas

Sebagaimana Visi Kabupaten Wonosobo Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri, Sejahtera untuk semua, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Tujuan Terwujudnya keluarga yang sejahtera dan tertanggulangnya kemiskinan dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan upaya pemenuhan hak anak.

Strategi dalam mencapai tujuan adalah optimalisasi pengendalian kuantitas dan persebaran penduduk melalui pelayanan pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga dan peningkatan efektifitas kelembagaan gender dan anak serta penguatan komitmen pengarusutamaan gender terintegrasi dalam berbagai tahapan proses pembangunan.

Indikator sasaran urusan PPKBPPPA adalah

1. Rata rata anak yang dilahirkan pada perempuan usia subur (TFR)
2. Laju pertumbuhan penduduk
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG),
4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),
5. Prevalensi kekerasan terhadap anak
6. Prevalensi kekerasan terhadap Perempuan

Rencana Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Rencana Strategis DPPKBPPPA
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Target IKK	Target Renstra					Rencana Capaian					Rasio Capaian				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Presentase anggaran responsif Gender	15	3,07	6,01	8,95	11,89	15	0,13	7,50	0,14	49,77	59	1,00	2,44	0,02	5,56	4,96
2	Presentase APBDes Responsif gender dan PUHA	20	13	15	17	19	20	12	17	17	31	31	1,20	1,31	1,13	1,82	1,63
3	Presentase anak berhadapan dengan hukum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Presentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Presentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

6	Jumlah lembaga layanan aktif tingkat desa	75	10	25	40	65	75	6	13	43	67	65	1,20	1,30	1,72	1,68	1,00
7	Presentase Lembaga Penyedia Layanan PP dan PA	100%	40	55	70	85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01
8	Presentase perempuan sebagai tenaga profesional	40%	38,57	38,93	39,28	39,64	40	0%	11,60%	45,39%	44,4	49,86	0,00	0,00	0,01	1,13	1,26
9	Preketerwakilan perempuan dan parlemen	8,44%	5,24	6,04	6,84	7,64	8,44	6,67%	6,67	6,68	2,22	4,44	0,02	1,27	1,11	0,32	0,58
10	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	50%	44,17	45,63	47,1	48,5	50	45,36%	47,72%	49,04%	46,76	51,07	0,01	0,01	0,01	0,99	1,05
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	70	65,05	66,51	67,7	68,9	70	63,85	59,31	67,55	57,17	57,7	1,00	0,91	1,02	0,84	0,84
12	Rasio KDRT Perempuan (kasus yang dilaporkan dan tertangani)	5	4,3	4,5	4,64	4,8	5	5	4,3	164%	2,11	1,2	1,22	1,00	0,36	0,45	0,25
13	angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas	100	97,19	97,89	98,6	99,3	100%	100	100	100	100	100	1,02	1,03	1,02	1,01	1,01
14	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (kasus yang dilaporkan dan tertangani)	3,5	2,86	3,02	3,16	3,34	3,5	4,1	4,3	4,5	1,72	0,7	1,52	1,50	1,49	0,54	0,21
15	Presentase desa ramah anak	10%	3,2	4,9	6,6	8,3	10	1,51	3,40%	4,15	4,53	5,6	1,01	0,01	0,85	0,69	0,67
16	Presentase puskesmas ramah anak	40%	22,4	24,6	29	33,4	40	63	67%	100%	83,33	83,33	3,50	0,03	0,04	2,87	2,49

17	CPR/ Contraceptive Prevalancy Rate (Prevalensi Peserta KB Aktif)	85,20%	81,2	82,5	83	84.3	85,00	80,46	74,49	77,84	78,51%	78,76	0,01	0,01	0,01	0,95	0,93
18	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
19	Rasio petugas KB / desa	30,00	2,88	2,66	2,44	2.22	30	4,03	4,07	4,08	4,14	4,41	1,30	1,41	1,53	1,70	0,02
20	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 - 19	45,00	85,00	75,00	65,00	55	45,00	65,00	64,00	68,67	68,67	68,65	0,72	0,75	0,92	1,06	1,25
21	Unmetneed	7,57	7,85	7,79	7,71	7.64	7,57	8,36	12,16	10,38	10,62	10,42	1,07	1,55	1,33	1,38	1,36
22	Cakupan Kepesertaan KB pada PUS keluarga pra sejahtera	75,00	50,00	55,00	63,00	69	75,00	30,01	75,50	78,09	77,55	77,39	0,63	1,51	1,42	1,23	1,12
23	Presentase Peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	45,00	43,00	43,50	44,00	44.5	45	41,02	32,38	36,34	37,86	38,01	0,98	0,75	0,01	0,86	0,85
24	Drop Out KB	10,00	16,52	14,89	13,26	11.63	10	17,20	37,68	12,67	10,49	9,99	0,99	2,28	0,01	0,79	0,86
25	% Kepesertaan KB Pria	0,04	2,80	3,10	3,40	3.70	4	2,33	2,15	2,32	2,41	2,51	0,91	0,77	1,75	0,71	67,84

26	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	457,00	452,00	454,00	455,00	456,00	457	432,00	432,00	412,00	359,00	33,00	0,96	0,96	0,91	0,79	0,73
27	% ANGGOTA Bina Keluarga Balita (BKB) ber - KB	87,39	87,35	87,36	87,37	87,38	87,39	87,36	83,11	84,93	84,03	84,12	0,01	0,01	0,01	0,96	0,96
28	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang terbentuk dan terbina	234,00	224,00	225,00	228,00	231,00	234	233,00	235,00	235,00	247,00	166,00	1,04	1,05	1,04	1,08	0,72
29	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang terbentuk dan terbina	40,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40	266,00	266,00	266,00	257,00	174,00	0,33	13,30	10,64	8,87	4,97
30	Rata-rata usia kawin pertama perempuan	18 th	17,00	17,30	17,50	17,80	18	16,90	17,01	19,67	17,00	17,00	0,01	1,00	1,13	0,97	0,96
31	Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan	20 th	18,00	19,00	19,00	20,00	20	17,00	18,01	17,50	19,00	19,00	0,94	1,00	0,92	1,00	0,95
32	% Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun %	0,02	3,01	2,76	2,50	2,25	2%	5,12	1,89	2,29	1,10	1,46	1,65	0,63	0,83	0,44	0,65

Tabel 2.2
Rencana Anggaran Pelayanan DPPKBPPPA
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Anak dan perempuan	115.000.000	125.000.000	150.000.000	61.020.000	67.000.000	100,00	100,00	99,47	88,84	88,84	- 46,94	- 52,86
Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100.000.000	480.000.000	4.958.946.500	4.761.480.900	650.000.000	99,15	98,79	97,55	87,10	87,10	4.661,48	4.082,83
Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	560.000.000	430.000.000	470.000.000	356.939.400	55.000.000	99,70	93,55	99,29	98,82	98,82	- 36,26	- 36,83
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	340.000.000	370.000.000	500.000.000	137.396.100	303.000.000	100,00	99,92	99,89	100,00	100,00	- 59,59	- 59,59

Pelayanan administrasi Perkantoran	531.137.000	-	676.950.800	648.136.800	650.000.000	99,11	-	90,23	83,35	83,35	22,03	2,62
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	233.188.960	190.000.000	294.810.200	210.908.480	220.000.000	99,96	96,35	91,78	61,60	61,60	- 9,55	- 44,26
Program Keluarga Berencana	2.466.201.000	6.715.090.000	6.980.653.000	6.295.292.000	2.726.000.000	89,33	74,86	90,12	79,53	79,53	155,26	127,27
Kesehatan Reproduksi Remaja	180.000.000	190.000.000	241.357.500	94.180.000	120.000.000	99,48	98,64	100,00	99,32	99,32	- 47,68	- 47,76
Pelayanan Kontrasepsi	279.319.000	300.000.000	350.000.000	91.564.500	125.000.000	100,00	88,67	69,10	84,38	84,38	- 67,22	- 72,34
Pengembangan bahan informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	25.000.000	-	-	-	50.000.000	99,56	-	-	-	-	- 100,00	- 100,00
Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	-	60.000.000	-	-	-	-	98,83	-	-	-	-	-

Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	-	50.000.000	174.092.000	30.000.000	-	-	100,00	94,42	85,00	85,00	- 40,00	- 49,00
Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)	225.000.000	400.000.000	290.000.000	80.000.000	553.582.100	99,84	98,93	93,99	99,25		- 64,44	- 64,66
Pengendalian Penduduk	-	-	200.000.000	90.000.000		-	-	0,95	2,70		- 55,00	27,79
	5.054.845.960	9.310.090.000	15.286.810.000	12.856.918.180	4.933.000.000	1.086,13	1.048,54	1.026,78	969,88		4.312	3.713

2. Rencana Kinerja 2023

REncana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pelayanan Publik yang maskimal	Persentase Aset Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	100%
		Persentase Pemenuhan Sarpras Pendukung Kinerja	100%
		Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
2	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan akuntabel	Persentase keselarasan program renja Perangkat Daerah dan RKPD	100%
		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu (Renja, Renaksi, PK, LKPJ)	4 dokumen
3	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	46,60
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	4,44
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	59,06
		Persentase anggaran responsif gender	95,03
		Persentase APBDes responsif gender	45,64

		Persentase SDM pengelola layanan perlindungan perempuan dan anak terlatih	28,00
4	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Cakupan layanan konseling	0.17
		Cakupan lembaga layanan tingkat desa	33.96
		Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate	100
		Cakupan desa Desa/kelurahan layak anak	25.73
		Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	100,00
		Persentase anak korban yang mendapatkan layanan komprehensif	50
		persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100,00
		Persentase perempuan kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	50
5	Meningkatnya Kualitas keluarga	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.56
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100,00
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	78,51
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	10,12

		Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	38,31
		Drop out KB	8,70
		Kepersertaan KB pria	2,52
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	84,40
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	83,19
		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	89,45
		Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	2,50
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	72,03
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	55,36
		Rata-rata usia kawin pertama wanita	18,40
		Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	28,50
		Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan	19,60

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Di Kabupaten Wonosobo urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, utamanya dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) serta dibantu oleh kecamatan dalam rangka pelaksanaan fungsi mengkoordinasikan upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mendukung pencapaian misi 4 yaitu meningkatkan pelayanan dasar dan sarana dan prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata.

a. Alokasi Pendanaan

Untuk mendukung urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 melalui APBD telah mengalokasi anggaran sebesar **Rp9.094.157.993,00**. Alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2021 dapat terealisasikan sebesar **Rp7.449.495.098,00** atau 81,92%. Capaian program pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.8.1

**Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realis asi Angga ran
	Total Belanja	9.094.157.993,00	7.449.495.098,00	81,92
1	Program Pengendalian Penduduk	240.000.000,00	145.161.926,00	60,48
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	7.619.974.065,00	6.390.557.472,00	83,87
3	Program Pemberdayaa n dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.234.183.928,00	913.775.700,00	74,04

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2021

b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.240.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.145.161.926,00 atau 60,48 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.

Pada kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan pendataan keluarga sehingga tersedia informasi data kependudukan yang valid yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan kependudukan. Pendataan keluarga tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Maret s/d Juni 2021 dengan melibatkan PLKB, kader pendata dan tim PK21 Tingkat Kabupaten. Hasil dari pendataan kemudian di paparkan dengan kegiatan sarasehan PK 21.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga melalui pelatihan Inovasi SIPK tingkat kecamatan dilaksanakan untuk memaksimalkan pemanfaatan data PK yang sesuai dengan realita di ikuti oleh 150 kader pendata dan 37 petugas pengelola rumah data dengan narasumber kasi pendataan, kabid dalduk dan narasumber SIPK.

Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Wonosobo baru dalam tahap persiapan dikarenakan adanya pandemi covid-19.

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun sebesar 100%; rata-rata usia kawin pertama perempuan 19 tahun; rata-rata usia melahirkan pertama perempuan 20 tahun; % pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 2%.

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana

Program Pembinaan Keluarga Berencana tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.7.619.974.065,00 terealisasi sebesar Rp.6.390.557.472,00 atau 83,87 %.

Program pembinaan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk peningkatan kualitas dan pemerataan akses layanan KB, dengan melakukan Advokasi program KKBPK kepada

Stakeholder dan Mitra Kerja antara lain OPD terkait, Polri, TNI dan PKK sebanyak 14 advokasi, pelaksanaan KIE program KKBPK di 15 kecamatan 265 desa, media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang, pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluh KKBPK, serta evaluasi dan RTL program KKBPK kepada OPD dan balai Penyuluhan KB.

Untuk meningkatkan capaian keberhasilan program KKBPK di desa adalah dengan memaksimalkan peran dan kompetensi kader institusi masyarakat pedesaan (IMP) yang dalam hal ini adalah PPKDB dan Sub PPKDB. Pada tahun 2021 DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo melaksanakan pembinaan terhadap 273 IMP di 265 dan memberikan fasilitasi operasional kepada kader institusi masyarakat pedesaan (IMP) dengan pertemuan, sosialisasi, pembinaan kelompok kegiatan, pelestarian Peserta KB Aktif, dan KIE Program KKBPK.

Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dilakukan untuk meningkatkan pelayanan KB dengan menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di semua fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya, PLKB, PMB sebanyak 45 faskes di 15 kecamatan se Kabupaten Wonosobo serta dilakukan Workshope Pengelolaan Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Faskes dengan Aplikasi SIRIKA BKKBN, dengan peserta utusan Faskes KB dan Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan se Kabupaten Wonosobo dilaksanakan di Pebee Resto Jl. Jolontoro Gang Melati no.10 Wonosobo pada tanggal 23 Oktober 2021.

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran Indikator Kinerja Utama Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yaitu TFR 2.13

dan LPP 0,40 dengan sasaran PUS unmetneed, PUS Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, PUS dengan Pengguna Kontrasepsi Jangka Pendek yang masa pakainya hampir habis. Dilaksanakan serentak di Faskes KB diseluruh wilayah Kabupaten Wonosobo, gratis bagi PUS Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I. Dari target sebanyak 6.646 akseptor tercapai 6.517 akseptor, tidak cukup waktu untuk pelayanan KB MOW, karena pelayanan KB MOW di PKBRS RSUD Setjonegoro baru dibuka kembali pada bulan November 2021 setelah tutup pelayanan hampir 2 tahun karena Pandemi Covid-19.

Tahun 2021 terdapat 11 akseptor yang mengalami kegagalan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan hamil dan diberikan biaya kompensasi. Kegagalan yang sering terjadi meliputi kontrasepsi IUD, Implant dan MOP

Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana TFR, 2,13, LPP 0,40, MKJP 38.01%, mCPR 78,76%, dan Unmetneed 10,42%. Sarana tersebut berupa 6 paket berupa Penyediaan 10 unit Obgynbed, 10 set IUD Kit, 10 set Implant Removal Kit, untuk 10 Faskes Pemberi Pelayanan KB, 12 unit Personal Computer, Mebeler, Alat Tulis Kantor untuk 15 Balai Penyuluhan KB.

Untuk meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dilakukan sosialisasi/workshop Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jejaring dan Jaringannya, promosi dan konseling Kesehatan reproduksi, serta hak hak reproduksi kepada provider (Bidan KB) dan pengurus kelompok kegiatan, pelayanan KB Bergerak untuk mendekatkan akses layanan KB MKJP bagi sekitar 300 akseptor PUS unmet need bagi keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I yang dilaksanakan didesa dengan menggunakan fasilitas PKB atau PUSTU dengan dukungan Mobil Unit Pelayanan

(MUYAN). Pelayanan KB bergerak difokuskan pada desa/kecamatan prioritas yaitu Kecamatan Garung, Sukoharjo, Kaliwiro, Kalikajar, Kepil dan Sapuran. Disamping itu juga dilaksanakan promosi dan konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, peningkatan kesertaan KB pria yang dilaksanakan di PKBRS RSUD Setjonegoro Wonosobo. Dari target sebanyak 27 akseptor KB pria hanya tercapai 8 akseptor, sejumlah calon peserta MOP Pria mengundurkan diri, disebabkan takut dilakukan rapid test, khawatir hasilnya positif karena Rapid test adalah syarat untuk mendapatkan pelayanan KB MOP.

Kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB dilakukan dengan pembinaan terpadu kampung KB sebanyak 37 kampung KB serta pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB untuk membangun keluarga berencana yang berkualitas dengan pertemuan pokja kampung KB yang melibatkan Catin, PUS, Lansia, Keluarga, kader dan PLKB.

Program Pembinaan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TFR, 2,13, LPP 0,40 dan pada pencapaian indikator cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun sebesar 30,00%; CPR/ contraceptive prevalence rate (prevalensi peserta KB aktif) sebesar 85,20%; rasio petugas KB /desa sebesar 2 dan age specific fertility rate (ASFR) 15-19 sebesar 45%; indikator unmet need sebesar 7,57%; cakupan kepesertaan KB pada PUS keluarga pra sejahtera sebesar 75%; persentase peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) sebesar 45%; drop out KB sebesar 10% dan % kepesertaan KB pria sebesar 4%.

3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.1.234.183.928,00 terealisasi sebesar Rp.913.775.700,00 atau 74,04 %.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Salah satunya dengan pencegahan dan penurunan angka stunting yang dilaksanakan melalui pengadaan sarana edukasi stunting berupa pengadaan 10 unit kit siap nikah dan 10 unit BKB kit stunting untuk 10 kelompok remaja di 10 desa stunting sebagai bahan ajar prasarana penyiapan kehidupan berkeluarga dan penguatan 1000 hari pertama kehidupan. Disamping itu juga dilaksanakan orientasi/pelatihan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kader poktan, BKB, BKL, BKR, UPPKA, PIK R, Reorgansiasi BPC AKU, monitoring evaluasi PIK R dengan melibatkan 5238 PUS anggota UPPKA ber-KB mandiri, pembinaan Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana (**Saka Kencana**) **sebanyak 16 kegiatan**, pemilihan duta GenRe (Generasi Berencana) sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan edukasi, konseling dan mencegah pernikahan dini, seks pra nikah dan NAPZA. juga dalam mensosialisasikan mengenai stunting kepada masyarakat, peningkatan pemahaman kespro dan stunting bagi catin, PUS, BKR, BKL, BKB,POKTAN, IMP, kader serta pemberdayaan PIK remaja sebagai mitra kerja dan organsiasi kemasyarakatan dengan penguatan kapasitas dan sosialisasi bahaya stunting mulai dari hulu kepada 230 orang PIK Remaja dilaksanakan di Agrowisata Tambi pada tanggal 6 dan 7 Desember 2021.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera diarahkan pada pencapaian indikator jumlah kelompok bina keluarga balita (BKB) sebesar 457, % anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 87,39%; jumlah kelompok bina keluarga remaja (BKR) yang terbentuk dan terbina sebesar 234; jumlah kelompok bina keluarga lansia (BKL) yang terbentuk dan terbina sebesar 40.

c. Capaian Kinerja Program

Capaian Kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan pada RKPD 2021 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel III.B.8.2
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 terhadap RKPD Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	2021				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	CPR/Contraceptive Prevalancy Rate (Prevalensi Peserta KB aktif) (%)	%	78.76	85.20	73,82	86,64	T	85,2
2	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun (%)	%	100.00	100.00	100	100	ST	100

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	2021				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
3	Rasio petugas KB /desa (angka)	Angka	4.41	2.00	4,82	41,49	SR	2
4	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 (%)	%	31.00	45.00	29,00	135,56	ST	45
5	Unmetneed (%)	%	10.42	7.57	11,92	42,54	R	7,57
6	Cakupan kepersertaan KB pada PUS keluarga pra sejahtera (%)	%	77.39	75.00	71.07	94,76	ST	75
7	Persentase Peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) (%)	%	38.01	45.00	38.48	85,51	T	45
8	Drop out KB (%)	%	9.99	10.00	20.72	-7,20	SR	10
9	% Kepersertaan KB Pria (%)	%	2.51	4.00	2.74	68,5	S	4
10	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) (angka)	Angka	331.00	457.00	355	77,68	T	457
11	% anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	%	71.40	87.39	71.46	81,77	T	87,39
12	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang terbentuk	Angka	166.00	234.00	187	79,91	T	235

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	2021				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
	dan terbina (angka)							
13	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansis (BKL) yang terbentuk dan terbina (angka)	Angka	174.00	40.00	256	640	ST	40
14	Rata-rata usia kawin pertama perempuan (tahun)	%	17.90	18.00	19,08	106,00	T	18
15	Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan (tahun)	Tahun	19.00	20.00	19,00	95	T	20
16	% Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun (%)	%	1.46	2.00	1,46	137,50	ST	2

Sumber : Bappeda Kab. Wonosobo, 2021

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 16 indikator Kinerja Program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
- Realisasi Kinerja Program Kategori **Sangat Tinggi** sebanyak 5 indikator,
- Realisasi Kinerja Program Kategori **kategori Tinggi** sebanyak 8 Indikator.
- Realisasi Kinerja Sasaran dan Program Kategori **Sedang, Rendah** dan **Sangat Rendah sebanyak 3 Indikator**

Dari data diatas dari target indikator program RPJMD yang ditetapkan, masih ada indikator yang sangat rendah yaitu capaian rasio petugas KB/desa disebabkan jumlah tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang minim dan banyak yang pensiun.

Capaian unmetneed rendah karena pada tahun 2021 dari persalinan sebanyak 12.221 orang, yang berkb pasca persalinan sebanyak 4.779 orang atau 39,01%, sedangkan 7.442 atau 60,99% tidak berKB dengan alasan menyelesaikan masa nifasnya dan karena sedang menyusui (takut kualitas ASI nya terganggu). Disamping itu ada juga PUS tidak ber KB dengan alasan tidak ingin anak lagi tetapi suaminya bekerja diluar kota dalam jangka waktu lama.

Sedangkan untuk capain drop out Kb yang sangat rendah, disebabkan :

1. PUS berhenti ber KB karena merasa usianya sudah tua dan tidak subur lagi.
2. PUS mupar dengan 1 anak dan telah masa pakai implant 3 tahunan berhenti ber kb dengan alasan ingin hamil lagi.
3. Adanya kasus kegagalan penggunaan kontrasepsi (kehamilan yang tidak di rencanakan).

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Catatan DPRD Tahun 2020

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo tidak memberikan rekomendasi/catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, beberapa permasalahan yang tertuang dalam matriks permasalahan dan solusi belum sepenuhnya bisa dilaksanakan dan masih memerlukan penyelesaian pada masa mendatang.

e. Permasalahan dan Solusi

Tabel III.B.8.3
Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih ada sebagian kecil Pasangan Usia Subur yang belum memahami Metode Kontrasepsi modern yaitu sebesar 0,39% dari total Peserta KB Aktif sejumlah 109.896 akseptor	<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB modern yang merata dan terintegrasib. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama globalc. Meningkatkan Komunikasi Edukasi Informasi (KIE) metode kontrasepsi modern
2	Masih tingginya PUS yang belum terpenuhi KB nya (PUS unmetneed) sebesar 11,92%	<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatkan Promosi dan konseling KB kepada PUS unmetneed melalui berbagai media (elektronik dan media cetak)b. Menyediakan fasilitasi, peningkatan dan kualitas akses pelayanan KB MKJP Gratis bagi PUS Prasejahtera dan Sejahtera I.c. Melaksanakan pembinaan peserta KB
3	Masih tingginya angka	<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatkan pembinaan

No	Permasalahan	Solusi
	dropout peserta KB yaitu 20,72% yang disebabkan karena belum kuatnya sistim pencatatan dan pelaporan di tingkat lini lapangan	<p>peserta KB pasca pelayanan untuk menjaga keberlangsungan penggunaan kontrasepsi</p> <p>b. Melakukan workshop resfres Pencatatan dan Pelaporan bagi pengelola program KB di lini lapangan</p> <p>c. Meningkatkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di seluruh faslitas kesehatan melalui Sistem Informasi Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi (SIRIKA)</p>
4	Belum optimalnya penggunaan kontrasepsi MKJP pada PUS potensial yaitu sebesar 38,48 % dari total peserta KB Aktif	<p>a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB bagi seluruh PUS</p> <p>b. Menyediakan fasilitasi kegiatan peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)</p> <p>c. Menyediakan ketersediaan alat kontrasepsi Jangka Panjang (IUD, Implan)</p> <p>d. Meningkatkan dan optimalisasi peran mitra kerja Banggakencana dalam program KB</p>

No	Permasalahan	Solusi
5	Redahnya cakupan kesertaan KB Pasca Persalinan yaitu sebesar 41%	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan kerjasama dengan Faskes pemberi layanan persalinan (Rumah Sakit dan Puskesmas) untuk meningkatkan cakupan penggunaan KB bagi ibu pasca salin sebelum pulang kerumah. b. Melakukan pembinaan kelas ibu hamil c. Melakukan kegiatan Promosi dan konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran dari Faskes dan Poktan
6	Rendahnya Partisipasi langsung Pria dalam penggunaan Kontrasepsi yaitu sebesar 2,74%	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan peran motivator KB Pria diseluruh wilayah kecamatan b. Menyediakan fasilitasi pelayanan KB Vasektomi/MOP secara gratis c. Melakukan pembinaan kelompok Prio Utomo
7	Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak program di tingkat desa/RW maupun	Melaksanakan Kerjasama lintas sektoral dan melibatkan petugas lapangan dari masing masing lintas sektoral yang ada di wilayah (missal PKS, PKH)

No	Permasalahan	Solusi
	RT untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program KKBPK	
8	Masih ditemui orang tua yang menikahkan anaknya dibawah usia 19 tahun.	Meningkatkan jumlah dan kualitas peran BKR dan PIK Remaja di desa.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

a. Alokasi Pendanaan

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.742.430.000,00. Anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 1.371.882.241,00 atau 78,73%. Capaian program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. III.B.2.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2021

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisa si Anggar an
	Belanja Langsung	1.742.430.000,00	1.371.882.241,00	78,73
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	725.675.000,00	715.627.741,00	98,62
2	Program Perlindungan Perempuan	166.200.000,00	165.894.000,00	99,82
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	30.690.000,00	30.687.500,00	99,99
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	201.705.000,00	201.705.000,00	100
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	166.330.000,00	165.580.000,00	99,55
6	Program Perlindungan Khusus Anak	451.830.000,00	92.388.000,00	20,45
	BELANJA TOTAL	1.742.430.000,00	1.371.882.241,00	78,73

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2021 (diolah)

b. Program Kegiatan

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman *gender* dan peran serta perempuan dalam pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian program tersebut di tahun 2021, antara lain melalui pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga pemerintah dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG dan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG; pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dengan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, dan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; serta penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dengan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, dan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG yang dilaksanakan, berupa kegiatan sekolah perempuan, fasilitasi pertemuan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), fasilitasi pertemuan FKKG, penguatan PUG bagi PLKB, penguatan PUG bagi dunia usaha, penguatan PUG dan PPRG bagi kades dan BPD perempuan, penyusunan analisis PPRG bagi pokja PUG, penyusunan modul PPRG desa, dan pembuatan Naskah Akademik (NA) perda PUG.

Melalui kegiatan sekolah perempuan dengan sasaran perwakilan tokoh perempuan desa, kegiatan yang berlokus di Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto, Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar, dan Desa Ngadikusuman Kecamatan Kertek ini diharapkan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Adapun bentuk fasilitasi

pertemuan KPPI sebagai wadah pemberdayaan perempuan di bidang politik yang dilaksanakan adalah berupa kegiatan musyawarah luar biasa KPPI.

FKKG merupakan forum komunikasi yang mempunyai peran untuk mengadvokasi pengambil kebijakan agar mendukung program pengarusutamaan *gender*. Fasilitasi pertemuan FKKG yang dilaksanakan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman *gender* dan peran serta perempuan dalam pembangunan.

Beberapa kegiatan fasilitasi, antara lain pertama, penguatan *gender budgeting* lanjutan bagi FKKG Kabupaten Wonosobo yang diikuti oleh 30 orang peserta dengan narasumber dari Kita *Institute* dan Dinas PPKBPPPA. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman tentang program kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemahaman tentang *gender budgeting* dan meningkatkan kolaborasi aktif antara Dinas PPKBPPPA dengan Kita *Institute*.

Kedua, penguatan isu GESI bagi FKKG sebagai tindak lanjut rencana kegiatan FKKG, dan sebagai upaya penguatan serta mengaktifkan peran dan fungsi FKKG yang telah dibentuk, serta pengintegrasian PUG ke dalam program kegiatan kelembagaan masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Kegiatan ini diikuti oleh 28 orang peserta, dengan narasumber dari Dinas PPKBPPPA dan IBI.

Ketiga, peningkatan kapasitas FKKG untuk meningkatkan pemahaman tentang isu *he for she* dan tentang transformasi digital yang diikuti oleh 25 orang peserta, dengan narasumber dari UNSIQ.

Keempat, penyusunan rencana dan jadwal kegiatan FKKG dengan peserta sejumlah 28 orang, yang merupakan salah satu upaya agar PUG terintegrasi ke dalam program kegiatan kelembagaan masyarakat, dunia usaha dan media massa.

Penguatan PUG bagi PLKB merupakan bentuk sinergitas program dan kegiatan di tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa, diharapkan PLKB dapat menjadi sarana penyampai pesan mengenai program pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak secara utuh kepada masyarakat. Kegiatan yang diikuti oleh 65 orang PLKB ini dilaksanakan dengan pemateri dari Bidang PPPA Dinas PPKBPPPA.

Penguatan PUG bagi dunia usaha, melibatkan 30 orang peserta yang berasal dari kelompok Jarpuk. Melalui kegiatan ini, dunia usaha diharapkan dapat semakin memahami tentang PUG, PPRG, dan PPEP, begitu juga sinergi dalam penyelesaian masalah isu *gender* di Kabupaten Wonosobo diharapkan semakin meningkat antara pemerintah daerah dengan dunia usaha.

Berikutnya, penguatan PUG dan PPRG bagi kades/kalur dan BPD perempuan, yang dilaksanakan di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo dengan peserta sejumlah 500 orang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman tentang perencanaan kegiatan yang responsif *gender*, menyampaikan arah kebijakan PPPA dan PPRG, serta menginformasikan program kegiatan PUG dan PUHA, pemahaman tentang PPRG, PPRA, isu *gender*, isu gesi, hak anak dan penyusunan RPJM Desa yang responsif *gender*.

Selanjutnya adalah penyusunan analisis PPRG bagi pokja PUG yang diikuti 50 orang peserta. Pendampingan dalam penyusunan analisis responsif *gender* dan sosialisasi Peraturan Bupati No.10 Tahun 2021 tentang rencana aksi daerah (RAD) Kabupaten Wonosobo dan Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2021 tentang percepatan implementasi PUG sesuai strategi nasional PUG dan PPRG, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perangkat daerah hingga kecamatan mengenai *gender*, sehingga dalam proses perencanaan dan penganggaran pada perangkat daerah hingga kecamatan sudah responsif *gender*. Lebih lanjut, penerapan PPRG di tingkat desa/kelurahan telah diinisiasi dan terus didorong pelaksanaannya, karena akan sangat berperan dalam PUG.

Sebagai tindak lanjut atas salah satu permasalahan yang ada di tahun 2020, yakni belum tersedianya panduan PPRG Desa, maka di tahun 2021 ini dilaksanakan kegiatan penyusunan modul PPRG Desa. Proses penyusunan modul tersebut masih membutuhkan pembahasan dan

pemantapan lebih lanjut, sehingga dengan tersusunnya modul PPRG Desa ini nantinya, diharapkan pemahaman serta komitmen pemerintah desa tentang konsep dan prinsip peningkatan kualitas keluarga yang responsif *gender* dan pemenuhan hak anak semakin meningkat. Begitu pula terintegrasinya keadilan dan kesetaraan *gender*, serta pemenuhan hak anak ke dalam pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat keluarga dan masyarakat dapat terwujud, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan PPPA dengan pemerintah desa se kabupaten pun semakin meningkat. Pembahasan raperda PUG Bersama 15 perangkat daerah terkait juga telah dilaksanakan sebagai dasar penyusunan NA.

Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG, yang bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan yang responsif *gender* pada perangkat daerah dan desa, antara lain berupa pertama, pendampingan kader pendamping keluarga (KPK) tingkat kabupaten yang diikuti oleh 50 orang peserta, untuk menguatkan pembangunan ketahanan keluarga, pemahaman tentang fungsi keluarga, dan sekaligus membekali pelaksanaan verifikasi lapangan tentang APE melalui rapat koordinasi dan penyampaian materi oleh verifikator independen dari Kementerian PPPA.

Kedua, penyusunan panduan bagi tim teknis pokja PUG oleh 25 orang tim teknis pokja PUG termasuk diantaranya Bappeda, Inspektorat, BPPKAD, dan Dinas PPKBPPPA. Ketiga, penguatan PUG bagi toga dan toma yang diikuti oleh 50 orang peserta dari unsur MUI dan ICMI, melalui pelatihan penguatan PUG sampai dengan tingkat kecamatan dan desa, serta pembinaan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) kepada kelompok binaan di bawah MUI Kabupaten Wonosobo.

Keempat, FGD penyusunan perbup PPRG Desa bersama tim teknis pokja PUG dan perangkat daerah terkait, diantaranya Inspektorat, Bagian Hukum Setda, Bappeda, BPPKAD, dan Dinas PPKBPPPA. Kelima, sosialisasi aplikasi monev PUG dan PPRG melalui penyampaian informasi

bahwa dalam mempersiapkan diri menghadapi penilaian Anugerah Parahita Ekapraya, Wonosobo telah memiliki aplikasi yang membantu memudahkan proses pencatatan laporan kegiatan PUG. Sosialisasi ini diikuti oleh 50 orang perwakilan dari perangkat daerah se Kabupaten Wonosobo. Keenam, penyusunan *roadmap* PUG dan PPRG oleh tim sejumlah 15 orang dari LPPM UNNES Semarang dan Dinas PPKBPPPA.

Kegiatan selanjutnya adalah, sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, melalui rapat koordinasi jaringan perempuan usaha kecil (JARPUK) antara perangkat daerah terkait, kecamatan dan Jarpuk, berupa rapat koordinasi tentang penguatan Jarpuk; pembentukan Jarpuk kecamatan (Kaliwiro, Sapuran, Selomerto, Watumalang, dan Mojotengah) dan kelas bisnis bagi perempuan; dan fasilitasi pertemuan Jarpuk bagi perempuan usaha kecil kabupaten berupa rapat rutin.

Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, melalui monitoring PPEP Desa Karangsembung Kecamatan Kalibawang (anggota KWT dan kelompok PPEP); pendampingan PPEP Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang (anggota KWT dan kelompok PPEP), Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil (60 orang Kampung Anak Sejahtera), dan Kecamatan Kaliwiro (25 kelompok KWT); *workshop* pengembangan industri rumahan (IR) (50 kelompok perempuan pengusaha kecil industri rumahan); rakor tim pelaksana tingkat desa di Desa Wonosari Kecamatan Wonosobo (25 kelompok perempuan pengusaha kecil industri rumahan) dan Desa Jengkol Kecamatan Garung (25 kelompok industri rumahan); dan rakor tim pelaksana tingkat kabupaten/kelurahan/desa (50 kelompok PPEP dan industri rumahan). Kegiatan-kegiatan tersebut diikuti oleh anggota KWT, kelompok PPEP dan kelompok perempuan usaha kecil, sebagai sarana untuk mengetahui perkembangan kegiatan usaha kader tentang pengolahan hasil makanan, manajemen dan strategi pemasaran

berbasis *online*, dan sumbangan pendapatan perempuan, meningkatkan pemahaman tentang PPEP, serta meningkatkan komunikasi yang harmonis antara tim pelaksana dan pelaku industri rumahan.

Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui fasilitasi kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan istri Forkopimda. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui penguatan GOW.

Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui fasilitasi kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Periswara. Kegiatan ini ditujukan agar peran perempuan dalam pembangunan melalui pemberdayaan organisasi wanita dapat meningkat.

Kegiatan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui peringatan Hari Anak Nasional sebagai kampanye tentang pemenuhan hak anak, dan lomba video dalam rangka Hari Anak Nasional sebagai kampanye tentang pencegahan perkawinan usia anak.

Dari alokasi anggaran program pengarusutamaan *gender* dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp 725.675.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 715.627.741,00 atau 98,62%.

2) Program Perlindungan Perempuan

Program perlindungan perempuan dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi, dengan menyediakan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan dan melakukan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mendorong pemerintah untuk mengupayakan pencegahan dan penanganan dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Beberapa upaya tersebut diantaranya, bedah kasus

kekerasan, pelatihan penanganan kasus korban kekerasan (BASKOM) tingkat desa, penguatan PPT tingkat kabupaten, evaluasi SOP layanan terpadu, rapat koordinasi PPT, sosialisasi pencegahan kekerasan dan baskom, serta workshop BASKOM tingkat kabupaten. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, tim PPT, PUSPAGA, UPPPA POLRES, perangkat daerah terkait seperti DINSOSPMD, perangkat desa, pengurus BASKOM, kader, TP PKK, pemerhati anak, toga, toma, masyarakat desa, organisasi, serta Lembaga terkait lainnya.

Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, penanganan kasus korban kekerasan dapat ditangani mulai di tingkat desa, upaya pencegahan, permasalahan dan upaya penanganan korban juga dapat diperkuat di tingkat desa, melalui pemahaman yang baik oleh masyarakat dan pihak terkait lainnya, dan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan yang semakin baik pula, sehingga banyaknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang tidak dilaporkan dapat diminimalisir.

Selanjutnya, sebagai upaya untuk mengoptimalkan penanganan dan pendampingan korban kekerasan bagi perempuan dan anak, maka pemerintah juga melaksanakan fasilitasi operasional *shelter*, pendampingan korban, serta seminar/kampanye 16 hari anti kekerasan, melalui Dinas PPKBPPPA dengan melibatkan masyarakat, korban, dan UPIPA. Adapun alokasi anggaran program perlindungan perempuan sebesar Rp 166.200.000,00, dan dapat terealisasi sebesar Rp 165.894.000,00 atau 99,82%.

3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program pengelolaan sistem data gender dan anak diarahkan pada pengembangan SIGA. Ketersediaan data yang akurat *by system* menjadi pondasi utama dalam penyusunan berbagai kebijakan dalam pembangunan, terutama terkait *gender* dan anak. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data *gender* dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah melalui penyajian pemanfaatan data *gender* dan anak dalam kelembagaan data. Kegiatan ini

bertujuan untuk memenuhi ketersediaan data pilah *gender* dan anak sebagai data dasar dalam pembangunan. Pengumpulan data, *desk*, penyajian, dan sosialisasi data pilah dan data sistem informasi *gender* dan anak dilaksanakan oleh tim data dan tokoh perempuan Kabupaten Wonosobo.

Dari alokasi anggaran program pengelolaan sistem data *gender* dan anak sebesar Rp 30.690.000,00, dapat terealisasi sebesar Rp 30.687.500,00 atau 99,99%.

4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program peningkatan kualitas keluarga diarahkan pada optimalisasi pemenuhan hak serta pelaksanaan fungsi keluarga demi terwujudnya keluarga yang semakin berkualitas. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program peningkatan kualitas keluarga antara lain, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan *gender* (KG) dan hak anak tingkat daerah melalui advokasi kegiatan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak, serta penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah dan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah.

Advokasi kegiatan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak bertujuan untuk mendorong pelebagaan GSIB di desa, sebagai upaya untuk menurunkan AKI/AKB dan angka perkawinan anak. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain, evaluasi perkawinan usia anak di Kecamatan Garung dan Kalikajar; pelatihan bagi kader pendamping ibu hamil dan pola asuh serta pemenuhan hak anak di Desa Wonosari Kecamatan Wonosobo; pelatihan pola asuh bagi anak di desa bagi Desa Wonosari, Jogoyitnan, dan Pagerkukuh; rapat koordinasi pokja GSIB tingkat kabupaten; rapat koordinasi pokja GSIB kecamatan dan desa di Kecamatan Wonosobo; sosialisasi perbup penanggulangan perkawinan usia anak tingkat

kecamatan di Kecamatan Kalikajar, Garung dan Kertek; dan workshop GSIB.

Kegiatan-kegiatan yang diikuti antara lain oleh toga, toma, satgas GSIB kabupaten, kecamatan dan desa, orang tua, kader, guru, unsur KUA, pemerintah desa, PLKB, TP PKK kecamatan, muspika, dan bidan tersebut merupakan sarana sosialisasi, pendampingan, serta evaluasi dalam penanggulangan perkawinan usia anak dan dalam penurunan AKI/AKB.

Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah, dilaksanakan melalui peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu, sebagai kampanye tentang kesetaraan *gender* dalam pembangunan.

Adapun kegiatan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah, dilaksanakan melalui fasilitasi pertemuan PUSPAGA, pelatihan PATBM, pembinaan pola asuh di Desa Andongsili Kecamatan Mojotengah dan Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo, peningkatan kapasitas PUSPAGA, rapat koordinasi pokja BK-TKI, rapat koordinasi program PATBM tingkat kabupaten, sosialisasi program PATBM tingkat kecamatan dan desa di Desa Serang Kecamatan Kejajar dan Desa Keseneng Kecamatan Mojotengah, workshop BK-TKI, dan workshop PATBM. Beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan, antara lain tim PPT, tim PUSPAGA, BASKOM, pemerintah desa, toga, toma, kader, guru, pemuda, Kita *Institute*, tim pokja BK-TKI, pemerhati anak, dan pengurus PATBM, seluruhnya berupaya untuk berkomitmen dalam meningkatkan pemahaman tentang perlindungan anak. Sehingga diharapkan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan tersebut, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan semaksimal mungkin, melalui pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan yang telah diupayakan oleh pemerintah.

Dari alokasi anggaran program peningkatan kualitas keluarga sebesar Rp 201.705.000,00, dapat terealisasi sebesar Rp 201.705.000,00 atau 100%.

5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program pemenuhan hak anak dilaksanakan antara lain melalui kegiatan pelebagaan PHA pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha, dengan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha, serta koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan PHA.

Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha ditujukan untuk mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui peningkatan partisipasi anak. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain, fasilitasi evaluasi KLA melalui sosialisasi pencegahan perkawinan anak; fasilitasi *capacity building* FORKOS oleh tenaga ahli tingkat provinsi; pelatihan forum anak tingkat kecamatan di Kecamatan Kalibawang dan Kejajar; rapat koordinasi forum anak sebagai fasilitasi pemenuhan hak anak; rapat koordinasi gugus tugas KLA dengan pembahasan mewujudkan Kabupaten Wonosobo menjadi Kabupaten Layak Anak; sosialisasi desa layak anak di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar dan Desa Karangsembung Kecamatan Kalibawang, untuk meningkatkan pemahaman pengambil kebijakan dan komitmen bahwa Forum Anak (FA) sebagai indikator KLA; dan deklarasi sekolah ramah anak melalui penandatanganan deklarasi bersama mengenai sekolah ramah anak di Kemenag Wonosobo.

Kegiatan yang melibatkan Lembaga, anggota dan pengurus Aisyiyah, FORKOS kabupaten, forum anak kecamatan, perangkat daerah terkait, muspika, kasi kesos kecamatan, BPD, guru, kader, TP PKK kecamatan, toga, toma, dan kades ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya perkawinan usia anak, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi mengenai kabupaten layak anak, dan menguatkan komitmen mengenai kecamatan layak anak (KELANA) serta meningkatkan cakupan pendidik dan lembaga yang memahami SRA pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA dilaksanakan sebagai upaya percepatan terwujudnya KLA dan GN-OTA. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah, pelatihan KHA dan disiplin positif bagi 80 orang guru SD dan SMP sebagai upaya pemenuhan hak anak di sekolah; penguatan SRA bagi 60 guru SD dan SMP di Kemenag Wonosobo; penyusunan konsep perbup KLA; rakor program SRA yang melibatkan perangkat daerah terkait, TP PKK kabupaten, Lembaga dan pekerja sosial dalam upaya meng-SRA kan semua sekolah di Kabupaten Wonosobo; workshop jejaring forum anak dalam rangka mendorong partisipasi anak pada program pelopor dan pelapor; workshop SRA bagi 40 orang dari unsur perangkat daerah, guru SMP dan SMA agar memahami SRA pemenuhan hak dan perlindungan anak; penyaluran bantuan GN-OTA; rapat pengurus GN-OTA; dan sosialisasi program GN-OTA kepada masyarakat dan dunia usaha.

Dari alokasi anggaran program pemenuhan hak anak sebesar Rp 166.330.000,00, dapat terealisasi sebesar Rp 165.580.000,00 atau 99,55%.

6) Program Perlindungan Khusus Anak

Program perlindungan khusus anak dilaksanakan melalui, kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah, dengan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, serta melalui kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, dengan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi pencegahan TPPO di desa model; rakor TPPO secara rutin dalam kurun waktu 3 bulan sekali dengan agenda tindak lanjut dan evaluasi materi; pemetaan kelompok rentan TPPO di desa model; sosialisasi dan diskusi tematik dengan kelompok di desa model; dan workshop TPPO tingkat kabupaten. Desa model tahun 2021 berlokasi di Desa Jengkol Kecamatan Garung. Beberapa kegiatan tersebut melibatkan toga, toma,

perangkat desa, Kita *Institute*, perempuan dan anak sejumlah masing-masing 30 orang, kelompok perempuan dan anak, masyarakat desa, serta perangkat daerah terkait. Pelaksanaan kegiatan ditujukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang TPPO, pencegahan perkawinan usia anak, serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Adapun kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus, dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan kasus korban kekerasan. Realisasi anggaran yang bersumber dari DAK ini hanya 10%, dikarenakan masih banyak korban kekerasan di Wonosobo belum mau melapor, sedangkan pendampingan yang dilaksanakan dapat dilakukan hanya bagi korban yang sudah melapor ke polisi (harus dengan/berdasarkan surat polisi/surat keterangan dari kepolisian), baru kemudian mendapatkan fasilitasi berupa pembiayaan dari sisi kesehatan, pendampingan, rumah aman, serta saksi ahli untuk di pengadilan.

Kompleksitas permasalahan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Wonosobo, membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Dari alokasi anggaran program perlindungan khusus anak sebesar Rp 451.830.000,00, dapat terealisasi sebesar Rp 92.388.000,00 atau 20,45%.

c. Capaian Kinerja

Tabel III.B.2.2

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Indikator RKPD 2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	2021				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Persentase anggaran responsif <i>gender</i>	%	59	15	59	393,33	ST	15
2	Persentase APBDes Responsif <i>gender</i> dan PUHA	%	31	20	31	155	ST	20
3	Persentase anak berhadapan dengan hukum yang tertangani	%	100	100	100	100	ST	100%
4	Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	%	100	100	100	100	ST	100%

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	2021				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
5	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	%	100	100	100	100	ST	100%
6	Jumlah lembaga layanan aktif tingkat desa	%	65	75	112	149,33	ST	75
7	Persentase Lembaga penyedia layanan PP dan PA	%	100	100	100	100	ST	100%
8	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	%	49,89	40	49,86	124,65	ST	40%
9	Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen	%	4,44	8,44	4,44	52,61	R	8.44%
10	Persentase partisipasi	%	51,07	50	51,07	102,14	ST	50%

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	2021				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
	perempuan di lembaga pemerintahan							
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	57,7	70	57,7	82,4	T	70
12	Rasio KDRT perempuan	%	0,02	5	1,2	176,00	ST	5
13	Angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas	%	100	100	100	100	ST	100
14	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	%	0,01	3,5	0,07	198,00	ST	3,5

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
----	----------------------------------	--------------------------------------	--------	--

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 14 Indikator Kinerja Program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 12 indikator,
- Realisasi Kinerja Program Kategori kategori Tinggi sebanyak 1 Indikator.
- Realisasi Kinerja Sasaran dan Program Kategori Sedang, Rendah dan Sangat Rendah sebanyak 1 Indikator.

Dari data di atas, secara umum capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah mencapai target RPJMD 2021.

Rasio KDRT perempuan terjadi kenaikan. Pada tahun 2021 mencapai 0,08 dan prevalensi kekerasan terhadap anak menjadi 0,07. Pada tahun 2021 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 76 kasus. Capaian kinerja yang belum mencapai target RPJMD 2021 adalah persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen dari target yang ditetapkan sebesar 8.44%, indikator ini tetap 4,44 pada tahun 2021, dikarenakan pelaksanaan pileg adalah 5 tahun sekali. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tetap, yakni 57,7.

Capaian realisasi anggaran terendah adalah pada program perlindungan khusus anak, hal tersebut salah satunya dikarenakan masih banyak korban kekerasan di Wonosobo belum mau melapor, sedangkan pendampingan yang dilaksanakan dapat dilakukan hanya bagi korban yang sudah melapor ke polisi, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.

Ketersediaan unit serta petugas khusus pelayanan perlindungan perempuan dan anak merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Hal tersebut merupakan wujud komitmen hadirnya pemerintah secara penuh dalam pendampingan korban kekerasan. Saat ini unit pelayanan yang telah terbentuk adalah PUSPAGA yang baru merupakan layanan konsultasi keluarga. PUSPAGA memiliki visi memberikan penguatan keluarga (melalui konseling dan pendataan) baik bagi pasangan calon pengantin (catin) maupun bagi pasangan yang telah berkeluarga yang mengalami masalah keluarga, bukan menangani kasus. Penanganan kasus selama ini dilaksanakan oleh PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) yang terdiri dari Polres, UPIPA, RSUD, dan perangkat daerah terkait, belum ada unit serta petugas khusus pada Bidang PPPA Dinas PPKBPPPA dapat melayani, sehingga bila ada kasus diserahkan kepada UPIPA, peranan masih di tingkat koordinasi/sebatas mengkoordinir.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo tidak

memberikan rekomendasi/ catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, beberapa permasalahan yang tertuang dalam matriks permasalahan dan solusi belum sepenuhnya bisa diselesaikan dan masih memerlukan penyelesaian pada masa mendatang.

e. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Solusi pemecahan terhadap permasalahan yang ada dilakukan antara lain:

Tabel III.B.2.3

**Matriks Permasalahan dan Solusi
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Masih terbatasnya Lembaga layanan aktif desa serta tenaga yang berkompeten, yang menangani dan memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak.	Melakukan pemetaan kebutuhan, pembentukan kelompok, serta memfasilitasi pelatihan kepada Lembaga dan petugas layanan, dalam memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong adanya layanan yang berbasis masyarakat.
2.	Kurangnya partisipasi Angkatan kerja perempuan sehingga jumlah perempuan yang menjadi tenaga profesional dan keterlibatan perempuan dalam parlemen masih rendah	Meningkatkan jiwa kewirausahaan perempuan melalui pengembangan Jaringan Perempuan Usaha Kecil, industri rumahan, serta meningkatkan produktifitas ekonomi perempuan melalui peningkatan ketrampilan termasuk dan mendorong keterlibatan perempuan dalam parlemen.
3.	Masih terbatasnya pemenuhan hak perempuan dan anak, dalam hal fasilitasi sarana prasarana maupun partisipasinya dalam berbagai bidang	Mendorong pemenuhan fasilitasi sarana prasarana dan layanan perlindungan berbasis masyarakat untuk perempuan dan anak, pemenuhan hak perempuan dan anak, dan partisipasi perempuan dan anak dalam musrenbang, serta proses

	pembangunan	pembangunan lainnya
4.	Masih terbatasnya pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Wonosobo sebagai Kabupaten Layak Anak	Mendorong seluruh desa dan kelurahan menjadi desa/kelurahan layak anak
5.	Belum tersusunnya perda tentang KLA yang ditindaklanjuti dengan penyusunan perbup tentang KLA	Menyusun dan menetapkan perda tentang KLA
6.	Perbup dan Modul PPRG Desa sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang esponsive <i>gender</i> dan mengakomodir pemenuhan hak perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat keluarga dan masyarakat belum tersusun	Menyusun dan menetapkan perbup dan modul PPRG Desa
7.	Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Mendorong terbentuknya unit pelayanan serta petugas khusus pelayanan perlindungan perempuan dan anak

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas atas pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Strategis 2016-2021 (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Program) dan Tugas Pokok dan Fungsi kepada semua masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (Stakeholders) dalam pelaksanaan pembangunan Pendidikan Nasional selama Tahun 2021 Beberapa indikator kinerja belum mencapai target. Namun demikian relatif mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja 2021. Beberapa indikator kinerja tidak mencapai target sehingga memerlukan intervensi yang tepat dan kerjasama semua pihak sehingga sasaran dapat tercapai. Dengan penekanan terhadap hal-hal yang perlu dilakukan seperti tersebut di atas diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan visi dan misi Daerah Kabupaten Wonosobo

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOSOBO



DYAH RETNO SULISTYOWATI, S. STP

NIP. 19780419 199703 2 001